

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara teoritis, terdapat banyak variasi dari pengertian partai politik, para ahli mendefinisikannya dengan cara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Mark N. Hagopian mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan politik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol dan memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Sementara itu Menurut Neuman dalam Haris (2016, Hlm. 13) mendefinisikan partai politik sebagai:

*“the articulate organisation of society’s active political agents, those who are concerned with the control of governmental power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views. As such, it is the great intermediary which links social forces and ideologies to official governmental institutions and relates them to political action within the larger political community”*

Lawson dalam Haris (2016, Hlm. 13) mengartikan lain, bahwa partai adalah sebuah agensi, yang menghubungkan antara masyarakat dengan pengambil kebijakan. Definisi lain mengartikan partai politik adalah penerjemahan dari struktural sistem atau mengubah struktur kepentingan sosial dan ekonomi menjadi kekuasaan politik. Sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keduanya menyebut bahwa partai politik adalah pilar demokrasi.

Sambung Haris sebagai pilar demokrasi, keberadaan partai politik amatlah penting dan mendasar. Hal itu ditegaskan pada rumusan kode etik politik dan partai politik yang disusun oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) bekerja sama dengan Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa partai politik merupakan sebuah badan hukum -

publik yang memiliki fungsi menyeleksi pemimpin politik, membuat kebijakan publik, melakukan pendidikan politik, mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan publik, serta menjalankan komunikasi dan partisipasi politik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Fungsi rekrutmen yang dimiliki oleh partai-partai politik dan dijalankan dengan benar (secara ideal) dapat menjadi pintu masuk (*entry point*) sekaligus menjadi faktor pendorong (*driven factor*) bagi praktik demokrasi yang baik pada suatu negara.

Demi mewujudkan demokrasi yang baik perlu pembentukan karakteristik masyarakat dengan menanamkan pendidikan politik sejak dini. Pendidikan politik adalah pengembangan kesadaran generasi terhadap berbagai problematika kekuasaan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pendidikan politik bisa dilakukan dengan berbagai sarana seperti di instansi pendidikan formal dalam mata pelajaran PKn. Pendidikan politik merupakan proses dialogis antara pemberi dan penerima pesan, melalui pesan ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan symbol simbol politik yang ideal dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti pemerintah, sekolah, dan partai politik. pendidikan politik merupakan praktik dari ilmu kewarganegaraan, sedangkan ilmu kewarganegaraan adalah bagian dari ilmu politik yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara terdapat di *civics* atau ilmu kewarganegaraan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik mengandung praktik-praktik yang diturunkan ilmu politik. Sesuai dengan tujuan PKn yaitu menjadikan warganegara yang baik. Maka harus dipahami teori tentang demokrasi politik yang meliputi konstitusi, partai politik pemilu dan semua hal itu merupakan adopsi dari ilmu politik. Dengan memahami teori ilmu politik maka warga negara mempunyai pengetahuan tentang kenegaraan melalui praktis dari pendidikan kewarganegaraan maka warga negara dapat melaksanakan kewajibannya dan mengetahui hak yang harus diterimanya sebagai warga negara yang baik.

Selain penanaman pendidikan politik Partai politik harus mempunyai kader-kader partai yang berkualitas, unggul, kuat serta solid melalui proses kaderisasi politik, karena melalui kader partai yang akan maju dalam proses pemilu sebagai wakil rakyat. Partai politik haruslah berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, dengan mendudukkan kader-kadernya menjadi pejabat pemerintah sebagai wakil

rakyat, sehingga dapat turut serta dalam mengambil dan menentukan keputusan politik berupa kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Kaderisasi partai politik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu sistem politik, karena melalui proses ini orang-orang yang akan menjalankan sistem politik ditentukan. Partai politik menjalankan fungsi kaderisasi partai politik, pada fungsi ini partai politik mengalami proses politik yaitu melatih calon-calon pemimpin yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang dapat menyalurkan aspirasi dan mengemban amanat dari masyarakat sehingga menjadi pemimpin yang tidak hanya untuk kepentingan partainya tapi juga untuk kepentingan rakyat.

Menurut Bung Hatta dalam Ryan dkk (2013, hlm. 2) pernah menyatakan bahwa kaderisasi merupakan kerangka kebangsaan, karena kaderisasi sama artinya dengan menanam bibit untuk menghasilkan pemimpin bangsa di masa depan, pemimpin pada masanya harus menanam. Alasan mengapa kaderisasi kepemimpinan ini sangat diperlukan adalah karena semua manusia termasuk yang sekarang menjadi pemimpin, suatu saat pasti akan mengakhiri kepemimpinannya, baik dikehendaki maupun tidak. Proses tersebut dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang menjadikan mengapa kaderisasi kepemimpinan ini sangat diperlukan, adanya ketentuan periode kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi, adanya penolakan dari anggota kelompok yang menghendaki pergantian kepemimpinan, baik secara wajar maupun tidak wajar, Proses alamiah yakni usia yang menjadi tua dan kehilangan kemampuan memimpin (Pensiun), kematian dan dapat membentuk organisasi dengan perkiraan dalam jumlah ketersediaan pemimpin yang diperlukan dimasa depan secara berkesinambungan.

Dalam proses kaderisasi, terdapat dua macam prosesnya, yaitu kaderisasi informal dan kaderisasi formal. Dalam kaderisasi informal, proses yang dilakukan dapat dilihat dari proses kehidupan sehari-hari manusia di lingkungan masyarakat. Hal ini dilihat dari kehidupan kanak-kanak hingga remaja dan dewasa sebagai proses pembentukan jati diri, sehingga memiliki keunggulan dan mampu bersaing dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam kaderisasi informal terdapat beberapa kriteria atau indikator yang memperlihatkan kelebihanannya yaitu berkepribadian positif, gigih, mempunyai loyalitas, mempunyai dedikasi terhadap organisasi dan memiliki sifat dan sikap pasrah kepada Tuhan YME sebagai penentu

yang mutlak. Kaderisasi formal, kaderisasi lebih ke arah formal melalui cara yang sudah direncanakan, bersifat sistematis, terarah, dan berkelembagaan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Sedangkan definisi kepemimpinan sendiri menurut para ahli sering kali menggunakan kata yang berbeda beda, tergantung dari sudut pandang para ahli tersebut memandang kepemimpinan. Menurut Tead dalam Ryan dkk (2013, hlm. 3 )menyatakan “bahwa kepemimpinan merupakan kegiatan dalam memengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.

Kepemimpinan dan kaderisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam pengembangan organisasi. Kaderisasi pun menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi karena kaderisasi merupakan bentuk upaya-upaya mendukung terbentuknya integritas kepribadian dan kemampuan untuk menggerakkan orang lain secara intensif sehingga dapat mempersiapkannya untuk menjadi pemimpin di masa depan. Fungsi dari kaderisasi ini juga dapat mempersiapkan atau mencetak calon-calon yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi untuk menjadi pemimpin di masa depan yang siap dalam menjalankan organisasinya. Maka dari proses kaderisasi ini dapat melahirkan seorang kader, sehingga tak dapat dipungkiri bahwa kaderisasi adalah nyawa dari organisasi Menurut Partanto dan Bahri dalam Ryan dkk (2013, hlm. 1) terlebih lagi kaderisasi dalam partai politik mempunyai peran dan fungsi yang sangat vital dalam keberlangsungan dan elektabilitas partai politik, jika kaderisasi partai politik tidak berjalan maka partai politik akan terhambat regenerasinya sampai terancam stagnan, seperti halnya pada masa orde baru yang tidak menjalankan kaderisasi partai politik karna berkuasanya segelintir elit yang dapat menentukan calon-calon pada posisi strategis yang mengakibatkan mesin partai tidak berjalan terlebih lagi hanya ada tiga partai yang di perbolehkan mengikuti pemilu yaitu partai golongan karya (GOLKAR), partai persatuan pembangunan (PPP) dan partai demokrasi Indonesia (PDI).

Ryan dkk (2013, hlm. 4) menyampaikan bahwa pada masa Orde Baru kehadiran partai politik tidak terlalu diperhitungkan dalam melahirkan pemimpin-pemimpin nasional dan daerah. Hal ini dikarenakan partai politik yang ada pada saat itu tidak mampu menjalankan peran dan fungsi yang semestinya, yang

disebabkan oleh berkuasanya segelintir elit yang mengendalikan berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk menentukan calon-calon yang mengisi posisi-posisi strategis di pemerintahan. Pada tahun 1998 saat peralihan masa orde baru ke reformasi mengalami perubahan dalam system politik, dari system politik otoritarian menjadi system politik demokratis, dengan diterapkan system demokratis memberikan perubahan terhadap dinamika kehidupan politik.

Lanjut Ryan pada saat masa reformasi, peta perpolitikan Indonesia berubah dratis, ditandai dengan dibukanya kran demokrasi yang sebesar-besarnya. Inilah yang menjadi momentum lahirnya partai politik di Indonesia yang sesungguhnya. Dimana partai politik memainkan peran dan fungsinya dalam sistem perpolitikan Indonesia, yang dapat dilihat dengan munculnya partai-partai baru yang tidak terbandung. Masing-masing dari partai politik yang muncul, memiliki ideologi yang berbeda-beda yang mengusung kepentingan masyarakat plural. “Dalam masa demokrasi, partai politik merupakan salah satu pilar yang mempengaruhi kualitas demokrasi suatu negara” (Imansyah, 2015, hlm. 375), disamping pemilu yang juga menjadi pilar utama demokrasi. “Menjadi pilar dalam demokrasi menjadikan partai politik memiliki peranan yang sangat penting, seperti dalam proses seleksi kepemimpinan dan pengisian jabatan publik” (Harjanto, 2014, hlm. 138).

Pada dasarnya, pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi meliputi segala aktivitas partai dari mulai penerimaan anggota, pembinaan kualitas kader, sampai dengan penempatan/penugasan kader-kader partai dalam jabatan-jabatan strategis (rekrutmen). Hal tersebut diilustrasikan sebagai berikut: kader merupakan hasil dari pengkaderisasian yang diperoleh karena adanya rekrutmen politik. Kader di dalam suatu parpol menentukan daya jual partai politik di masyarakat. Jika pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi baik akan menghasilkan kader yang berkualitas dan berkapabilitas pula, begitu pun sebaliknya. Dihasilkannya kader kader yang berkualitas dan berkapabilitas tentu akan menyorot partai politik asal kader tersebut muncul. Jadi, kualitas kader-kader yang ada dalam partai politik sangat dipengaruhi oleh pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi partai tersebut.

Dapat dibayangkan jika partai politik sebagai sumber pemimpin nasional sampai tingkat lokal tidak memiliki pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi yang baik, tentu ini akan memunculkan berbagai persoalan, yang salah satunya

ditunjukkan dengan adanya politik kekerabatan, kurangnya militansi dan kualitas kader hingga terjadinya pragmatisme politik .

Tumbuh dan berkembangnya politik kekerabatan memunculkan sejumlah ketimpangan karena politik kekerabatan menutup akses bagi orang-orang yang memiliki sumber daya yang terbatas dan tidak memiliki hubungan kekerabatan untuk dapat menjabat di posisi politik. Sedangkan bagi mereka yang memiliki hubungan, sudah dipastikan calon tersebut dapat mengakumulasi pengaruh, kekayaan dan juga penguasaan wilayah. Jika suatu wilayah telah dikuasai oleh sekelompok elit bahkan dari keluarga yang sama, maka sumber daya daerah tersebut akan dikuasai oleh mereka.

Dapat dipastikan bahwa kekuatan utama berada pada segelintir elit sehingga jalan kepentingannya pun tidak menutup kemungkinan hanyalah untuk kepentingan para elit, bukan untuk kebaikan bersama. Seperti yang terjadi di Banten, dimana politik kekerabatan menguasai hampir seluruh posisi kepemimpinan strategis di provinsi tersebut. Pada akhirnya dapat dibuktikan setelah ditangkapnya Gubernur Banten masa itu Ratu Atut Chosiyah, baru terbongkar bahwa beberapa proyek dan program daerah daerah dilakukan dan ditujukan untuk memperkaya diri dan kerabatnya.

Selain politik kekerabatan, banyak parpol yang mengusung calonnya untuk menduduki posisi tertentu, baik pusat maupun daerah, atas dasar popularitas dan ketenaran. Mereka menganggap popularitas/ketenaran calon yang diusung akan dapat meraup simpati dan suara masyarakat dalam Pilkada, Pilgub maupun Pileg. Rekrutmen artis dalam Pilkada, Pilgub maupun Pileg secara instan tanpa melalui pola rekrutmen yang seharusnya dan tidak melalui mekanisme kaderisasi yang berlaku, mengartikan bahwa hal tersebut telah memotong mata rantai proses kaderisasi internal partai politik. Ini tentu akan menciptakan suatu kondisi ketidakadilan di dalam internal partai itu sendiri.

Kader yang telah mengabdikan dan berdedikasi serta meniti karir sebagai kader dalam partai justru tertutup kesempatannya untuk menjadi seorang calon dalam Pilkada, Pilgub maupun Pileg. Fenomena ini merupakan lompatan besar dalam politik Indonesia sebagai wujud konsolidasi demokrasi, yaitu kecenderungan baru partai politik untuk mencalonkan orang yang populer menurut Mietzner dalam

Ryan dkk (2013, hlm. 7) Sepertihalnya pada momentum pilkada jawa barat tahun 2018 partai NasDem mengusung ridwan kamil sebagai calon gubernur provinsi jawa barat, saat itu ridwan kamil merupakan bakal calon gubernur provinsi jawa barat yang paling potensial tetapi bukan sebagai kader partai politik seyogyanya partai politik adalah tempat meniti karir politik bagi kader partai politik tetapi partai NasDem mengusng ridwan kamil yang bukan kader partai NasDem.

Selain pragmatisme politik, Keberadaan kader bagi partai politik merupakan suatu hal yang sangat vital dalam menjalankan roda organisasi partai dan kerja-kerja politik, Kompetisi antar partai politik dan tantangan politik yang semakin berat dalam setiap kontestasi politik pemilu maupun pemilukada menuntut partai politik untuk terus melakukan inovasi dan perumusan strategi-strategi politik dalam meraih kemenangan politik. Maka, menjadi suatu keniscayaan bahwa kader-kader partai yang memiliki militansi dan kualitas akan senantiasa dimaksimalkan peranannya dalam proses pemberdayaan sumber daya yang dimiliki oleh partai politik untuk pengembangan dan eksistensi partai politik. peningkatan kualitas sangat diperlukan demi menjaga kelangsungan sebuah organisasi. Peningkatan kualitas kader partai politik harus dilakukan sebagai usaha pengembangan kemampuan dalam memecahkan masalah, melalui proses mengikut sertakan atau meningkatkan peran serta orang-orang yang dipimpin. Kualitas kader yang di bentuk melalui kaderisasi partai politik harus di sertai dengan ideologi partai yang menjadi arah partai politik ini akan memainkan fungsinya, apa yang akan disosialisasikan ke masyarakat, sikap dan orientasi politik seperti apa yang akan dibentuk, masyarakat seperti apa yang menjadi basis perjuangan partai, dengan nilai-nilai seperti apa perjuangan itu akan dilakukan, bentuk masyarakat seperti apa yang akan dibentuk dan lain sebagainya.

Dengan dasar ideologilah partai itu akan bergerak melalui program kebijakan partai yang kemudian di jalankan melalui kader partai politik, tetapi jika ideologi partai politik sebagai salah satu variabel kaderisasi tidak diperkuat akan menghasilkan kader yang tidak berkualitas dan tidak berkompeten, seperti yang terjadi di indramayu, dimana lucky hakim sebagai wakil bupati indramayu mengundurkan diri dari jabatannya dengan dalih kurang mendapat porsi dalam proses pemerintahan dan tidak dapat merealisasikan 99 janji kampanyenya,

diketahui lucky hakim berpasangan dengan Nina Agustiana dengan di usung oleh 4 partai yaitu PDI Perjuangan, NasDem, Perindo dan Gerindra, Pengunduran diri lucky hakim sebagai wakil bupati indramayu dirasa kurang pantas di lakukan mengingat lucky hakim sudah mempunyai kontrak politik dengan masyarakat indramayu selama 5 tahun, ini menggambarkan kegagalan dalam kaderisasi partai politik yang mengasihkan kader yang tidak berkompeten.

Selain kualitas kader, masih banyaknya fenomena perilaku kader pindah partai politik hal itu merupakan suatu realitas politik yang lumrah dalam kancah perpolitikan Indonesia, dikarenakan banyaknya motif dari para politisi. Maraknya politisi pindah partai dilatar belakangi oleh buramnya ideologi partai politik, gagalnya partai politik dalam melakukan pendidikan politik, serta sistem pengkaderan yang tidak efektif. Partai politik kurang mapan dalam fungsi kaderisasi sehingga kader dalam aktivitas politiknya tidak menjiwai ideologi partai, sehingga mengarah pada pragmatisme politik yang dilakukan politisi. Selain motif pragmatisme, diketahui pula terdapat motif agar politisi dapat mempertahankan eksistensi dalam Pemilu dengan berpindah partai (Muafiah, 2019, hlm. 1).

**Tabel 1. 1**  
**Daftar Politisi pindah partai Politik tahun 2022**

No	Nama	Asal Parpol	Parpol Baru	Karir Politik
1.	Wanda Hamidah, S.H., M.Kn.	NasDem	Golkar	DPRD Provinsi DKI Jakarta 2009-2014
2.	Dr. TGB. Muhammad Zainudin Majdi, LC., M.A.	Golkar	Perindo	Gubernur NTB 2008-2013 dan 2013-2018
3.	Bayu Airlangga	Demokrat	Golkar	DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024
4.	Dr. Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, M.M.	PPP	PKS	Wali Kota Makassar 2004-2009 dan 2019-2024

Sumber : nasional.tempo.com

Berdasarkan pengamatan tersebut bahwa kaderisasi partai politik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu sistem politik dan membentuk kepemimpinan yang idel agar tidak terjadinya politik kekerabatan maka dari itu peneliti tertarik untuik meneliti masalah ini kedalam skripsi dengan judul **“Peran Pola Kaderisasi Partai Politik Terhadap Kepemimpinan di Daerah Provinsi Jawa Barat”** (Studi Kasus di Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat).

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan dalam penelitian maka diperlukan rumusan masalah yang jelas. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pola Kaderisasi Politik oleh partai PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan kader sebagai pemimpin di tingkat Daerah?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh partai PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam kaderisasi partai politik?
3. Bagaimana Solusi Partai PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam membentuk militansi dan kualitas kader?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pola Kaderisasi Politik oleh partai PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan kader sebagai pemimpin di tingkat daerah.
2. Hambatan yang dihadapi oleh partai PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam kaderisasi partai politik.
3. Solusi Partai PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam membentuk militansi dan kualitas kader.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan serta tujuan yang diuraikan sebelumnya, diharapkan agar penelitian ini dapat memberi dan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan atau masukan dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan dan pemikiran dalam lingkungan politik mengenai pola kaderisasi partai politik dan pengaruhnya terhadap kepemimpinan di daerah Provinsi Jawa barat untuk kepentingan studi, pemilu dan parpol.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah informasi dalam melakukan fungsi kaderisasi politik bagi pelaku politik, anggota partai politik dan pengurus partai politik.
- b. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dengan terjun langsung ke lapangan dan memberikan pengalaman belajar menumbuhkan kemampuan dalam meneliti.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan judul skripsi serta acuan penelitian, maka penulis mendefinisikan variabel-variabel yang terkait sebagai berikut:

### 1. Partai Politik

Menurut UU Nomor 2 tahun 2008, partai politik diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia (WNI) secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan menurut AD/ART PDI Perjuangan partai politik merupakan alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme dan sosio demokrasi.

### 2. Kaderisasi Partai Politik

Kaderisasi Partai Politik meliputi segala aktivitas partai dari mulai penerimaan anggota, pembinaan kualitas kader, sampai dengan penempatan/penugasan kader-kader partai dalam jabatan-jabatan strategis. di dalam Partai PDI Perjuangan kaderisasi merupakan hal yang fundamental hal itu termaktub dalam AD/ART PDI Perjuangan yang berbunyi PDI Perjuangan mempunyai fungsi untuk mempersiapkan kader partai sebagai petugas partai untuk ditugaskan dalam struktur partai, lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga publik.

### 3. Kepemimpinan

Menurut James M. Black (2020, hlm. 8) dalam bukunya *management* mengatakan bahwa “a guide to Executive Command, Kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama di bawah pimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. Sedangkan dalam penelitian ini kepemimpinan adalah seseorang yang memegang kendali atau mempunyai kekuasaan dalam lembaga-lembaga politik dan Lembaga-lembaga publik. Kemudian pada penelitian ini difokuskan kepada kepemimpinan kader PDI Perjuangan.

## F. Sistematika Penilaian

Susunan sistematika pembahasan dalam penulisan tentang Pola Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan di Daerah Provinsi Jawa Barat, peneliti uraikan sebagai berikut:

- BAB I** : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan sesuai judul proposal ini
- BAB II** : Merupakan landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka berpikir yang berisi tentang Partai politik, Kaderisasi Partai Politik, dan Kepemimpinan di Jawa Barat.
- BAB III** : Merupakan metode penelitian yang menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Desain penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, defenisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik pengukuran, uji coba instrumen dan teknik analisis data.
- BAB IV** : Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang memuat deskripsi objek penelitian, hasil penelitan serta pembahsan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. Pada bab ini akan memaparkan profil objek penelitian, pengujian dan hasil analisis data,dan pembahasan dari hasil data dalam penelitian yang dilakukan.
- BAB V** : Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan juga saran yang diberikan bagi penelitian selanjutnya